



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PAHMI
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3. NHK : 1006028

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.256.605.000**

1. Tanah Seluas 418 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 404 m2/131 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. Tanah Seluas 5.578 m2 di KAB / KOTA BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 41.835.000
4. Tanah Seluas 2.130 m2 di KAB / KOTA BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 15.975.000
5. Tanah Seluas 16.770 m2 di KAB / KOTA BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 125.800.000
6. Tanah Seluas 3.097 m2 di KAB / KOTA BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 23.227.500
7. Tanah Seluas 2.512 m2 di KAB / KOTA BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 12.560.000
8. Tanah Seluas 14.513 m2 di KAB / KOTA BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 108.800.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 1.121 m2/75 m2 di KAB / KOTA BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 8.407.500

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 77.000.000**

1. MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.



60.000.000

2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

7.000.000

3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

7.000.000

4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.

3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 2.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 50.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.386.105.000

III. HUTANG

Rp. 91.755.335

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.294.349.665

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.